

SKRIPSI

KOMPARASI PENGATURAN PAJAK KARBON ANTARA INDONESIA DAN JEPANG DALAM MEWUJUDKAN *NET ZERO EMISSION* DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

FARHAN NADHIF

2110112143

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 06/PK-VII/V/2025

ABSTRAK

KOMPARASI PENGATURAN PAJAK KARBON ANTARA INDONESIA DAN JEPANG DALAM MEWUJUDKAN *NET ZERO* *EMISSION* DI INDONESIA

Perubahan iklim merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh negara di dunia, konferensi internasional lingkungan hidup manusia menjadi bukti kepedulian dunia terhadap isu tersebut dan menghasilkan berupa perjanjian dan dokumen-dokumen dengan tujuan Agar dapat menilai sejauh mana perkembangan perubahan iklim global. penelitian ini membuahakan 2 (dua) rumusan masalah; (1) bagaimana pengaturan pajak karbon di Indonesia dan Jepang; (2) apa proyeksi kedepan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pengaturan pajak karbon dalam mewujudkan target *Net Zero Emission*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas pengaturan pajak karbon di Indonesia dan membahas secara komparatif pengaturan pajak karbon Jepang dalam upaya mewujudkan target *Net Zero Emission* (NZE). Hasil pembahasan penelitian ini, di Indonesia, meskipun telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan didukung berbagai regulasi turunannya, implementasi pajak karbon masih menghadapi tantangan teknis dan kebijakan, termasuk ketidakpastian tarif serta kesiapan sektor industri. Sebaliknya, Jepang telah menerapkan pajak karbon sejak tahun 2012 dengan kerangka hukum yang stabil melalui Tax for Climate Change Mitigation, serta penguatan melalui sistem *Emission Trading Scheme* (ETS) di beberapa sektor. Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembenahan struktural dalam kebijakan fiskal lingkungan di Indonesia dengan memperhatikan pengalaman Jepang, khususnya dalam aspek harmonisasi regulasi, insentif ekonomi, serta sistem pengawasan dan verifikasi emisi yang transparan. Dengan demikian, pajak karbon dapat berperan secara signifikan sebagai instrumen transformatif dalam mendukung pencapaian target NZE di Indonesia secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Net Zero Emission, Perbandingan Hukum.

